



**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN**

**# bangga
melayani
bangsa**



KEMENKUM KALSEL NEWS

BULETIN

MINGGU KE-2 APRIL 2025



**KANWIL KEMENKUM
KALIMANTAN SELATAN**

- DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
- DIVISI PELAYANAN HUKUM
- BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](https://www.kemenkumkalsel.go.id)



[@kemenkumkalsel](https://twitter.com/kemenkumkalsel)



kalsel.kemenkum.go.id

Kemenkum Kalsel Ikuti Apel Pegawai dan Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H bersama Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

Banjarmasin, Humas_Info - Keluarga Besar Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) menggelar Apel Pegawai dan Halal Bihalal 1446 H/2025 M pada Rabu, (09/04/2025). Kegiatan yang berlangsung secara virtual ini diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Kalimantan Selatan (Kalsel), bertempat di Balai Pertemuan Garuda.

Acara ini dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil, Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, para Pejabat Struktural, serta seluruh Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU). Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Polhukam), Yusril Ihza Mahendra, bertindak sebagai pembina apel.

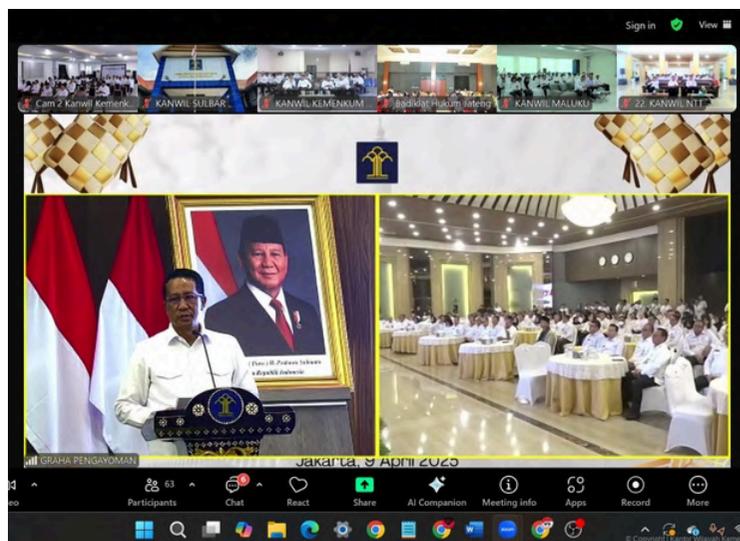
Dalam amanatnya, Menko Hukum, HAM, Imipas menyampaikan beberapa pesan penting kepada seluruh jajaran. Ia menekankan pentingnya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan Asta Cita Presiden dan 17 Program Prioritas. Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh jajaran untuk memastikan pencapaian target kinerja yang terukur dan relevan, serta menjalankan perjanjian kinerja dengan penuh tanggung jawab.

Efisiensi anggaran menjadi poin penting lainnya, di mana Menko Polhukam mengingatkan untuk menghindari praktik markup dan melaksanakan perjalanan dinas secara selektif, efektif, dan efisien. Di atas segalanya, Yusril menekankan pentingnya mengutamakan program kerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui acara ini, diharapkan tali silaturahmi antar pegawai semakin erat dan semangat kerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat semakin meningkat.



Menkum Tekankan Transformasi Digital dan Apresiasi ASN Berprestasi dalam Momen Halal Bihalal



Menurutnya, keberhasilan transformasi digital akan membawa dampak besar terhadap kemudahan layanan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pernyataan ini senada dengan arahan Presiden yang mendorong seluruh lembaga untuk menghapus hambatan birokrasi (barrier) dan memberikan layanan yang cepat, mudah, dan transparan.

“Kalau kita berhasil membangun ini, terutama bagi teman-teman yang memberikan pelayanan langsung, maka ini akan meningkatkan taraf atau derajat kematangan kita dalam memberi ruang orang lain untuk berinvestasi,” ujar Supratman.

Dalam kesempatan tersebut, Menkum juga menyampaikan apresiasi secara khusus kepada tiga unit utama, yakni Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang dinilai telah menunjukkan kinerja optimal dalam memberikan pelayanan publik. Ia menyebut bahwa menurunnya tingkat keluhan masyarakat menjadi indikator bahwa sistem pelayanan sudah berjalan dengan lebih baik.

Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kinerja aparatur, Menkum juga mengusulkan pemberian kenaikan pangkat istimewa setiap tahun bagi ASN berprestasi. Ia menyebut penghargaan ini tidak hanya diberikan di tingkat pusat, tetapi juga di seluruh wilayah dan unit kerja. Inisiatif ini diharapkan menjadi pemicu semangat, kreativitas, dan loyalitas pegawai dalam membangun Kementerian Hukum yang semakin terpercaya.

Kegiatan Halal Bihalal ini juga diikuti oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan secara daring di Balai Pertemuan Garuda. Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Struktural, serta seluruh Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) di lingkungan Kantor Wilayah, sebagai bentuk dukungan dan kebersamaan dalam membangun semangat transformasi dan pelayanan yang lebih baik.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyampaikan kesiapan seluruh jajarannya untuk mendukung arah kebijakan yang disampaikan Menkum.

“Kami siap mendukung penuh program perubahan yang dicanangkan Kementerian Hukum, terutama dalam mendorong transformasi digital dan pelayanan publik yang semakin transparan dan akuntabel sesuai arahan Bapak Menteri,” ujarnya secara terpisah.



Ranperda Insentif Pajak hingga Hak Keuangan DPRD HSU Dibahas dalam Rapat Harmonisasi Bersama Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar Rapat Harmonisasi bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), yang membahas tiga Rancangan Peraturan Bupati sekaligus. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Kalsel ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana beserta jajaran JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dari pihak Pemkab Hulu Sungai Utara hadir Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten HSU, Najeriansyah, bersama jajaran SKPD terkait.

Adapun tiga Ranperda yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat harmonisasi kali ini meliputi:

1. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak dan/atau Sanksi Administratif serta Kemudahan Perpajakan di Daerah;
3. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Najeriansyah, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin dengan Kemenkum Kalsel, seraya menegaskan pentingnya proses harmonisasi dalam mewujudkan regulasi yang tepat guna. “Ketiga ranperda ini menyentuh aspek fiskal daerah dan tata kelola pemerintahan yang krusial. Dengan adanya harmonisasi, kami ingin memastikan bahwa seluruh substansi yang dirumuskan dapat memenuhi kebutuhan di daerah,”* ujar Najeriansyah.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana menekankan bahwa proses harmonisasi merupakan tahap penting dalam pembentukan produk hukum daerah. “Harmonisasi menjadi ruang untuk melakukan pembulatan dan pemantapan konsepsi atas rancangan peraturan, sekaligus memastikan agar substansinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tujuan akhirnya adalah agar produk hukum yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif di daerah,” ungkap Anton.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Pemkab Hulu Sungai Utara dapat segera menyelesaikan perbaikan hasil dari rapat harmonisasi kali ini sehingga proses pembentukan tiga peraturan tersebut dan mengahadirkannya sebagai instrumen hukum yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Peresmian Kantor Baru Mako BINDA Kalsel: Dukung Sinergi Keamanan Wilayah

Banjarbaru, Humas_Info – Dalam rangka memperkuat sinergi antar instansi dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) turut hadir dalam acara peresmian Kantor Baru Markas Komando (Mako) Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Kalimantan Selatan yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru, Kamis (10/4/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Kalsel diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, yang menghadiri acara secara langsung bersama para pimpinan daerah lainnya. Hadir pula Kepala BIN Republik Indonesia, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, jajaran Forkopimda, para bupati/walikota se-Kalsel.

Gubernur Kalimantan Selatan dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemusatan pemerintahan di Komplek Perkantoran Pemprov Kalsel kini semakin lengkap dengan hadirnya Kantor BINDA yang baru. Ia berharap, suasana kerja yang lebih baik dapat mendukung peningkatan kinerja BINDA dalam menjaga keamanan daerah.

Senada dengan itu, Kepala BIN Republik Indonesia dalam sambutannya menegaskan bahwa gedung baru ini merupakan bagian dari upaya strategis meningkatkan efektivitas kerja dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.

Kakanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, secara terpisah menyampaikan selamat atas peresmian kantor baru Mako BINDA Kalsel. Ia menilai, kehadiran gedung baru tersebut dapat memperkuat koordinasi antar instansi dalam mendeteksi dan mencegah potensi gangguan keamanan di wilayah Kalimantan Selatan.

“Kami mengucapkan selamat peresmian Kantor Mako BINDA Kalsel. Dengan fasilitas baru dan representatif, kami optimis sinergi antar lembaga akan semakin solid, terutama dalam mendukung keamanan hukum dan ketertiban masyarakat,” ujar Nuryanti.

Acara ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada para pihak yang berkontribusi serta pengguntingan pita sebagai simbol peresmian gedung baru Mako BINDA Kalsel.



Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Bersama DPRD Tabalong



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar Rapat Harmonisasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong. Agenda rapat yang digelar di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel, Rabu (10/4/25) ini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Tabalong tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Rapat harmonisasi ini merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan daerah yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ranperda tersebut diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Tabalong sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran strategis pesantren di tengah masyarakat.

“Harmonisasi menjadi langkah penting untuk memastikan Ranperda ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel serta Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong bersama seluruh anggota Komisi I, Ketua Bapemperda, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Persidangan DPRD dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Tabalong. Kolaborasi lintas institusi ini menunjukkan pentingnya sinergi dalam menghasilkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong, H. Akhmad Helmi, menegaskan bahwa pesantren memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter bangsa.

“Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga pusat dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, kami memandang perlu adanya regulasi yang memberikan perlindungan, pengakuan, dan fasilitasi kepada pesantren,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Akhmad Helmi menjelaskan bahwa pertumbuhan pesantren di Kabupaten Tabalong menunjukkan potensi besar dalam mendukung pembangunan daerah dari aspek spiritual dan sosial. “Melalui Ranperda ini, kami berharap dapat menciptakan sistem pendukung yang kuat untuk kemajuan pesantren, baik dari sisi kelembagaan maupun operasionalnya,” tambahnya.

Anton Edward Wardhana menutup rapat dengan menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam proses harmonisasi. “Kami memastikan setiap norma dalam Ranperda ini tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai lokal dan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan dapat benar-benar dijalankan secara efektif di lapangan,” tutupnya.

Jelang Pemeriksaan BPK, Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Konsolidasi Kesiapan Dokumen dan Data Dukung



Banjarmasin, Humas_Info — Pada Kamis (10/04) Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka memimpin rapat persiapan menjelang pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang akan berlangsung di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan (Kanwil Ditjen ImigrasiKalsel) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kalimantan Selatan (Kanwil Ditjen Pas Kalsel) pada tanggal 13 hingga 19 April 2025.

Rapat ini menjadi momentum konsolidasi penting bagi seluruh jajaran untuk menyatukan langkah dan memastikan kesiapan dalam menghadapi pemeriksaan tersebut. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel yang sebelumnya merupalan entitas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dalam arahannya, Rustam Sakka menegaskan bahwa kelengkapan dan keakuratan data dukung menjadi hal krusial yang harus diperhatikan.

“Saya menghimbau seluruh jajaran untuk dapat mempersiapkan seluruh dokumen dan data pendukung yang dibutuhkan oleh Tim BPK RI. Kita harus pastikan semua tertata rapi dan siap untuk ditelaah,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas bagian agar proses pemeriksaan dapat berjalan lancar dan tanpa hambatan.

“Pemeriksaan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi bentuk tanggung jawab kita dalam menjaga integritas laporan keuangan instansi. Oleh karena itu, saya harap kita semua bekerja maksimal untuk mendukung kelancaran pemeriksaan ini,” tutup Rustam.



Dorong Paten dan Hak Cipta, Kanwil Kemenkum Kalsel Gandeng Universitas Borneo Lestari



Banjarbaru, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan terus berkomitmen mendorong penguatan ekosistem Kekayaan Intelektual (KI) di dunia akademik. Bertempat di Universitas Borneo Lestari, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan kegiatan koordinasi dalam rangka peningkatan permohonan paten dan hak cipta, Kamis (10/04).

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri 2025 yang tengah digaungkan secara nasional. Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Bidang Pelayanan KI, tim JFT/JFU dan Helpdesk KI Kanwil Kemenkum Kalsel, serta pimpinan program studi dari Universitas Borneo Lestari, antara lain Khairunnisa, M.H. (Ka. Prodi S-1 Hukum) dan Hidayatullah As-Syahri, S.E., M.M. (Ka. Prodi S-1 Manajemen).

Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pelayanan KI, Riswandi, menyampaikan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam melindungi hasil karya civitas akademika melalui pendaftaran paten dan hak cipta.

“Lingkungan kampus adalah ladang emas inovasi dan kreativitas. Sudah saatnya hasil penelitian dan karya ilmiah mahasiswa terlindungi secara hukum. Ini bukan hanya soal perlindungan, tapi juga soal daya saing,” ungkap Riswandi.

Kegiatan koordinasi ini menghasilkan beberapa poin penting, antara lain: sosialisasi kebijakan Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri 2025, pemahaman strategis pentingnya pendaftaran KI, serta pembahasan pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual di Universitas Borneo Lestari. Selain itu, dibahas juga rencana pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) sesuai nomenklatur terbaru Kemenkum, serta inisiasi kolaborasi penyelenggaraan mata kuliah Kekayaan Intelektual.

Khairunnisa, M.H. menyambut baik inisiatif ini. “Kami sangat mendukung pembentukan Sentra KI di kampus kami. Ini akan menjadi langkah maju dalam memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual mahasiswa dan dosen,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap sinergi dengan perguruan tinggi semakin menguat, demi mendorong terciptanya ekosistem KI yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.



47 Produk Hukum Daerah Diharmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan di Triwulan I 2025



Banjarmasin, PPPH_Info - Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan seiring sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memfasilitasi pembentukan regulasi hukum di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus berkomitmen untuk selalu memberikan layanan yang terbaik.

Dalam periode triwulan I tahun 2025 ini saja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan telah menerima sebanyak 54 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) yang dimohonkan baik atas inisiatif Kepala Daerah maupun DPRD untuk dilakukan harmonisasi. Dari jumlah tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan telah menyelesaikan proses harmonisasi atas 47 produk hukum di wilayah dengan rincian 27 Raperda dan 20 Raperkada sesuai dengan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.

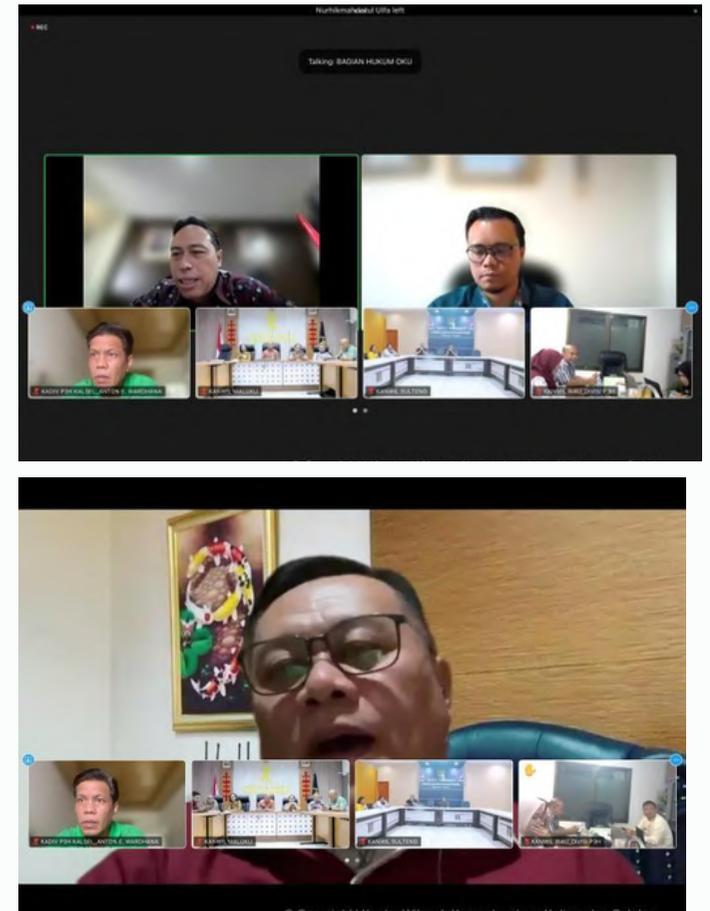
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, dalam beberapa kesempatan rapat harmonisasi sering mengatakan bahwa proses harmonisasi merupakan amanat Undang-undang yang harus dilaksanakan. "Harmonisasi ini merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," ungkapinya.

"Harmonisasi ini dilakukan agar tujuan dan dasar penyusunan, gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan, keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, isu krusial yang dibahas, dan hal-hal lain yang berkembang pada tahap penyusunan terpenuhi sehingga dengan selarasnya substansi rancangan dan teknik penyusunan, diharapkan menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya", lanjut Nuryanti Widyastuti.

Berdasarkan data permohonan harmonisasi, ternyata dari 14 pemerintah daerah yakni pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang telah mengajukan harmonisasi Ranperda/Ranperkada. Dalam hal ini Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi kabupaten yang terbanyak dalam mengajukan produk hukum untuk dilakukan harmonisasi dengan 16 permohonan (3 Raperda dan 13 Raperkada), kemudian disusul oleh Kabupaten Balangan dengan 12 permohonan (11 Raperda dan 1 Raperkada). Sedangkan masih terdapat 6 Provinsi/Kabupaten/Kota yang sama sekali belum mengajukan produk hukumnya di tahun ini, sehingga tentu saja ini patut dipertanyakan.

"Hal ini tentunya menjadi bahan analisa dan evaluasi sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Untuk ke depannya, menjalin sinergitas dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan layanan, khususnya terkait dengan program pembentukan regulasi di wilayah," ujar Anton E. Wardhana, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

Ikuti Sosialisasi Teknis Seleksi Peacemaker Training, Kanwil Kemenkum Kalsel Berkomitmen Dukung Penuh Program Nasional



Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan, Anton Edward Wardana, turut hadir secara daring dalam kegiatan Sosialisasi Teknis Seleksi Peacemaker Training, yang digelar pada Jumat (11/4) pagi, sebagaimana tertuang dalam surat undangan resmi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari seleksi Peacemaker Justice Award 2025 yang telah menjangkit 2.157 peserta dari seluruh Indonesia. Agenda ini menjadi bagian dari tahapan Seleksi Daerah Kabupaten/Kota yang diarahkan langsung oleh BPHN melalui surat PHN.HN.04.03-93 dan ditandatangani Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Constantinus Kristomo.

Atas sesi daring yang diikuti oleh seluruh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum se-Indonesia, Anton Edward Wardana menyampaikan komitmen Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan dalam menyukseskan agenda nasional tersebut.

“Kami siap melaksanakan tahapan Seleksi Peacemaker Training di wilayah Kalimantan Selatan secara optimal, transparan, dan sesuai arahan pusat. Ini adalah momentum penting untuk memperkuat budaya hukum di tengah masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan,” ujar Anton.

Partisipasi Kanwil Kemenkum Kalsel dalam kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan Peacemaker Justice Award 2025 yang bertujuan mendorong peran aktif masyarakat dalam menciptakan keadilan berbasis perdamaian di tingkat daerah.

Kolaborasi Strategis Jaga Stabilitas Politik Daerah, Kemenkum Kalimantan Selatan Hadiri Rapat Tim Pemantauan Politik



Banjarbaru, AHU_Info – Dalam rangka memperkuat koordinasi antarinstansi dan menjaga stabilitas politik di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari, menghadiri Rapat Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan pada Jumat (11/04).



Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel ini merupakan bagian dari agenda rutin yang mempertemukan lintas sektor, seperti aparat penegak hukum, Bawaslu, KPU, instansi vertikal, serta perwakilan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Kalsel. Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Hasanudin, bersama Adi Prayugo selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi.



Dalam forum ini, Dewi Woro Lestari menyampaikan peran penting Kemenkum dalam memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), serta mencegah potensi penyalahgunaan hukum oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia juga menyampaikan pentingnya pemetaan informasi Ormas sebagai langkah strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah dinamika politik daerah.

“Rapat ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi dalam menyikapi isu-isu politik daerah sekaligus menjalin kolaborasi konkret antar lembaga,” ujarnya. Selain sebagai wadah berbagi informasi, kegiatan ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai permasalahan aktual dan merumuskan langkah-langkah solutif demi menciptakan iklim politik yang damai dan kondusif. Sebagai tindak lanjut, Kemenkum Kalimantan Selatan siap menjalin kerja sama intensif dalam hal pertukaran data dan informasi terbaru guna mendukung ketahanan politik daerah.

Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, forum ini diharapkan mampu mempererat solidaritas dan memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan stabilitas politik di Provinsi Kalimantan Selatan.



Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri 2025, Kemenkum Kalsel Lakukan Koorinasi Inventarisasi Desain Industri Bersama BSPJI Kota Banjarbaru Banjarbaru

Banjarbaru, Humas_Info – Dalam rangka menyukseskan Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) melaksanakan koordinasi bersama Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Kota Banjarbaru pada Kamis (10/04).

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, didampingi oleh para JFT/JFU serta Helpdesk Kekayaan Intelektual Kanwil. Pertemuan ini bertujuan untuk mendukung penguatan perlindungan kekayaan intelektual, khususnya di sektor industri, melalui inventarisasi kandidat kawasan desain industri.

Dalam sesi koordinasi tersebut, tim dari Kantor Wilayah menyampaikan bahwa tahun 2025 akan menjadi Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri yang difokuskan untuk meningkatkan pemahaman serta pendaftaran kekayaan intelektual di berbagai bidang, salah satunya desain industri. Salah satu topik yang disoroti adalah pentingnya perlindungan desain industri pada kemasan produk air minum yang menjadi bagian dari produk unggulan lokal. Selain itu, tim juga mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi mitra industri dalam memahami prosedur dan mekanisme pendaftaran desain industri.

“Kami berkomitmen untuk menyukseskan Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri 2025 dengan menggandeng berbagai instansi teknis dan pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan. Kolaborasi ini penting agar perlindungan kekayaan intelektual, khususnya desain industri, dapat dipahami oleh pelaku usaha,” ujar Riswandi.

Dari pihak BSPJI Kota Banjarbaru, hadir perwakilan yang terdiri dari Ridla Nor Hadi selaku Asesor Manajemen Mutu Industri Pertama, Dwi Harsono dan Jojor Kakanda Purba yang merupakan Pembina Industri Ahli Pertama, serta Evy Setiawati selaku Kepala Seksi Pengembangan Jasa Teknik dan Dewi Susilawati, Kepala Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi. Keterlibatan para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong kesadaran pentingnya perlindungan KI di sektor industri lokal.

Sebagai tindak lanjut, BSPJI Kota Banjarbaru akan menyampaikan data kemasan produk minuman yang ada di wilayahnya untuk dijadikan bahan inventarisasi kandidat kawasan desain industri. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di Kalimantan Selatan serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pelaku industri.





**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

bangga
melayani
bangsa



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](#)



[@kemenkumkalsel](#)



[kalsel.kemenkum.go.id](#)